



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jl. Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593134, 593037 Fax. (0271) 593037  
Website : [www.dishubinfokom.sukoharjokab.go.id](http://www.dishubinfokom.sukoharjokab.go.id) email : [\\_dishubinfokom@sukoharjokab.go.id](mailto:_dishubinfokom@sukoharjokab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 551.2 / 3A / I / 2023

T E N T A N G

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2021, tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 79).

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 berikut lampirannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun evaluasi pencapaian kinerja bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- KETIGA : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Januari 2023



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Kepala Bapperida Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Arsip.
-



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Rajawali No. 7 Mojotegalan, Joho, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Kode Pos : 57513

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET TAHUNAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	SATUAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	0,18	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Prosentase angka kecelakaan sarana transportasi	1,25%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	70.90%	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	30.000.000
2													Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	Unit	2.049.136.550
3													Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	20.000.000
4													Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	20.000.000
5																	
6																	
7								Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	10.27 %	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12	Laporan	772.852.000
8													Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1	Laporan	20.000.000
9													Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	Laporan	20.000.000
10										Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	33	Unit	350.747.400
11													Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	Laporan	30.000.000
12										Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	dokumen	33.100.000

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET TAHUNAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	SATUAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13										Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4	Laporan	20.000.000
14													Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	27.317.200
15							Program Pengelolaan Pelayaran	Prosentase kinerja layanan penyeberangan sungai	100%	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Laporan	15.000.000
16				Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi	25,50%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	83%	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4	dokumen	300.000.000
17													Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	dokumen	300.000.000
18													Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Laporan	50.000.000
19										Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	25	Unit	100.000.000
20													Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3.300	unit	32.299.525.000,00
21													Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1.285	unit	540.000.000,00
22													Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7.000	unit	150.000.000
23										Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4	unit	363.800.000
24										Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Laporan	545.440.000
25							Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Jalan Kabupaten/Kota	100%	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Jalan Kabupaten/Kota	100%	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	123	unit	395.000.000
26										Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6	Laporan	50.000.000
27										Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	10	Laporan	50.000.000

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET TAHUNAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	SATUAN	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
28							Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase kinerja layanan perkeretaapian	100%	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Laporan	773.835.400,00	
29				Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai Sakip	70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	50.000.000	
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	30.000.000	
42										Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	orang	5.310.043.000	
43													Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	331.906.700	
44													Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	20.000.000	
45										Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	156	Paket	52.650.000	
46													Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104	Orang	38.300.000	
47										Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	40.000.000	
48													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	57.692.726	
49													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	40.000.000	
50													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76	Paket	265.000.000	
51													Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	80.000.000	
52													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	dokumen	5.500.000	
53													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	Laporan	95.000.000	

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET TAHUNAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	SATUAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
54										Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	unit	15.910.000
55										Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	10.090.000
56													Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	270.980.000
57													Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	5.000.000
58													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	715.000.000
59										Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33	unit	200.000.000
60													Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	150.000.000
61													Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17	unit	20.000.000

Sukoharjo, Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



**Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661110 199503 1 004

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023**

**PERANGKAT DAERAH : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUNAN TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2023		UNIT PENGANGGUNGJAWAB	LOKASI
						TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	0,18					DINAS PERHUBUNGAN	
1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Prosentase angka kecelakaan sarana transportasi	1,25%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	70.90%	2.119.136.550		
2				Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	2.119.136.550		
3				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	10.27 %	1.274.016.600		
4				Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	812.852.000		
5				Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	380.747.400		
6				Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	33.100.000		
7				Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	47.317.200		
8				Program Pengelolaan Pelayaran	Prosentase kinerja layanan penyeberangan sungai	100%	15.000.000		
9				Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	15.000.000		
10	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Prosentase angka kecelakaan prasarana transportasi	25,50%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	83%	35.143.765.000		
11				Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	650.000.000		
12				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	33.089.525.000		
13				Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	363.800.000		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUNAN TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2023		UNIT PENGGANGGUNGJAWAB	LOKASI
						TARGET KINERJA	ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14				Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	545.440.000		
15				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Prosentase Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	445.000.000		
16				Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	50.000.000		
17				Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase kinerja layanan perkeretaapian	100%	773.835.400		
18				Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	773.835.400		
19	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai Sakip	70	Program Penunjang Urusan	Prosentase Pelaksanaan Urusan	100%	7.803.072.426		
20				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	80.000.000		
21				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.661.949.700		
22				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	90.950.000		
23				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	583.192.726		
24				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	15.910.000		
25				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.001.070.000		
26				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	370.000.000		

Sukoharjo, Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



**Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661110 199503 1 004